

Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Dengan Politik Indonesia Kontemporer

Muhammad Muhibuddin✉

Mulyodadi Social Science Foundation, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

Purpose – This paper attempts to examine the concept of liberation theology formulated by an Indian thinker Asghar Ali Engineer and its relevance to Indonesia contemporary political issues.

Design/methods/approach – This study is categorized as qualitative-descriptive research using a literature-based approach. The primary data analyzed in this research are Asghar Ali Engineer's works.

Findings – The study finds that the Islamic liberation theology proposed by Engineer is rooted in the belief that Islam is essentially a religion liberating humanity from all forms of oppression, both spiritual and social. For Engineer, the divine revelation in the Qur'an is not merely a normative text but also a historical document having to be interpreted within the context of the struggle against tyranny and injustice. Engineer emphasizes that Islamic values such as justice (adl), equality (musawah), and compassion (rahmah) must be a foundation for the formation of a society free from structural oppression. The main characteristic of an Islamic society, according to Engineer, is the absence of oppression and injustice. In elaborating his liberation theology, Engineer also incorporates aspects of Marxism, particularly its spirit of emancipation, while at the same time criticizing its rejection of religion or spiritual elements. Engineer's concept of liberation theology can be utilized as an approach or perspective to analyze political and economic issues in Indonesia, including agrarian conflicts and the exploitation of natural resources by extractive industries, which result in various forms of inequality and destruction in social life.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 15-02-2025

Accepted: 21-06-2025

KEYWORDS

Asghar Ali Engineer;
Liberation; Justice;
Equality; Resistance

CONTACT: ✉ moxcheev@gmail.com

© 2024 The Author(s). Published by Yayasan Ilmu, Yogyakarta, IDE.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

Pendahuluan

Meskipun dipandang sebagai disiplin keilmuan yang membincang persoalan ketuhanan, teologi senantiasa terkait dengan persoalan-persoalan konkrit di masyarakat. Kajian teologi bukan sesuatu yang otonom; lepas dari sisi-sisi lain kehidupan. Persoalan teologi senantiasa berjaln kelindan dengan persoalan-persoalan sosial yang lebih luas. Bahkan menurut Harun Nasution, lahirnya aliran-aliran teologi di dalam Islam asal-muasalnya bukan dipicu oleh faktor ketuhanan, melainkan oleh faktor politik. Perselisihan politik, seperti konflik antara Ali dan Muawiyah serta peristiwa arbitrase (tahkim), memicu perpecahan di kalangan umat Islam sehingga mendorong lahirnya berbagai kelompok yang pada akhirnya mengembangkan pemikiran teologisnya masing-masing (Nasution, 1986).

Pertentangan politik di kalangan umat Islam, menjadi penyebab lahirnya pemikiran teologi yang beragam. Sebab, perdebatan politik yang mengemuka waktu itu bukan hanya menyentuh persoalan sosial-kemanusiaan, melainkan telah menukik ke ranah ketuhanan. Keterkaitan persoalan teologi dan politik di kalangan umat Islam ini masih terus berlangsung hingga sekarang dengan beragam corak dan polanya.

Perdebatan teologi kemudian menjadi usang justru ketika ia dipisahkan secara ketat dari persoalan-persoalan riil masyarakat. Haruskah pembahasan soal Tuhan dipisahkan dari problem-problem sosial-kemanusiaan? Perbincangan mengenai Tuhan yang sangat teosentris tentu menjadi problem tersendiri karena tidak bisa menjawab masalah-masalah riil di dalam kehidupan. Perdebatan teologi yang teosentris itu sendiri dalam sejarahnya juga dalam rangka menjawab persoalan kemanusiaan tentang eksistensi Tuhan. Namun, persoalan manusia tentang Tuhan itu kini berkembang semakin kompleks. Karena itu, teologi kalau masih dikehendaki untuk bisa eksis secara aktual dan faktual, pembahasannya harus dinamis dan progresif seturut dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

Diperlukan langkah berani bagi umat Islam untuk menghidupkan ijtihad dan rasionalitas demi memperbaharui dan mengaktualkan konsep teologi Islam dengan perkembangan zaman seperti yang pernah dilakukan oleh para teolog Muslim klasik (Nasution, 1982:45). Bukan hanya itu, pembaharuan ini juga penting dilakukan agar teologi juga mampu memberikan kontribusi dan jawaban riil bagi kehidupan sosial manusia. Karenanya, memandang dan memposisikan teologi sebagai fakta teoritis yang teosentris sudah tidak lagi memadai untuk era sekarang. Sebaliknya, teologi harus dipandang dan diposisikan sebagai kerangka praksis, sebagai sistem ilmu pengetahuan yang bukan hanya berorientasi pada diskursus ketuhanan yang sifatnya vertikal-transendental, melainkan juga pada aksi-aksi kemanusiaan yang sifatnya sosial-horisontal. Akidah atau teologi tidak bisa lagi dipandang sebagai perangkat epistemologis yang hanya mendedah soal eksistensi dan wujud Tuhan, tetapi harus dipandang sebagai daya atau spirit tranformasi sosial.

Sebagai kekuatan perubahan sosial, teologi harus diproyeksikan sebagai landasan etis bagi tindakan praksis. Sebagaimana kata Hassan Hanafi, akidah tidak membahas sesuatu, melainkan mengarahkan perilaku. Ia mendorong tindakan dan pembangkit aktivitas yang menyatukan niat dan mengejawantahkan tujuan. Akidah sebagai motor penggerak manusia (Hanafi, 2003).

Spirit transformatif dalam sejarah perkembangan teologi telah mengaktual dengan munculnya teologi pembebasan. Secara historis, teologi pembebasan tidak muncul dari ruang kosong, melainkan terinspirasi dari persoalan-persoalan sosial yang konkret, yakni maraknya ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang sengaja diciptakan oleh penguasa-penguasa diktator yang berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan kapitalisme. Para tiran yang berkomplot dengan kaum pemodal inilah yang kemudian muncul sebagai kelas penindas terhadap rakyat. Teologi pembebasan muncul sebagai spirit perlawanan kelas tertindas (rakyat) terhadap kelas penindas (penguasa politik dan penguasa kapital).

Secara historis, teologi pembebasan muncul dan berkembang pada tahun 1960-an di Amerika Latin. Teologi pembebasan di Amerika Latin ini dipelopori dan diciptakan oleh para pemimpin Gereja, seperti para romo, pastor, pendeta dan ordo-ordo Gereja. Para pemuka agama Katholik dan juga protestan ini secara langsung memimpin gerakan perlawanan terhadap para tiran dan para penindas.

Menurut Michel Lowy, ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya teologi pembebasan di Amerika Latin, yakni faktor internal dan eksternal. Gerakan internal itu di antaranya termanifestasikan dengan lahirnya perkembangan ajaran teologi baru paska Perang Dunia ke II khususnya yang ada di Jerman dan Prancis, lahirnya perkembangan bentuk-bentuk baru ajaran sosial Kristen serta tumbuhnya sikap keterbukaan (open minded) untuk mengkaji filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern. Fatwa-fatwa Paus XXIII dan terutama konsili Vatikan II (1962-1965) melegitimasi dan mensistimatisasikan pandangan-pandangan baru tersebut.

Sementara faktor eksternalnya, masih menurut Lowy, adalah pertama, maraknya industrialisasi yang menyebabkan berbagai ketimpangan, ketergantungan dan kesenjangan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Amerika Latin. Kedua, meletusnya revolusi Kuba tahun 1959, sebagai sejarah baru Amerika Latin yang ditandai semakin intensifnya perjuangan sosial dan meningkatnya perlawanan terhadap rezim-rezim yang menindas (Lowy, 2003).

Secara epistemologis, teologi pembebasan ini merupakan sintesa pemikiran antara ajaran Kristen dengan filsafat Marxisme. Salah satu penggagas teologi pembebasan pada 1971, Gustavo Gutierrez, dalam bukunya, *Liberation Theology-Perspectives*, menegaskan bahwa kerajaan Tuhan harus dapat diwujudkan sekarang dan di dunia ini. Manusia, lanjut Gutierrez harus mampu membangun kehidupannya dengan dirinya sendiri melalui perjuangan politik. Dalam bukunya ini pula Gutierrez menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika Latin dengan memusnahkan kelas-kelas penindas dan membangun masyarakat sosialis (Gutierrez, 1974).

Pada tahap perkembangannya, semangat teologi pembebasan ini bukan hanya tumbuh dalam komunitas Katolik atau Kristen, melainkan juga marak di komunitas Muslim. Hal ini karena dalam fakta sejarahnya, banyak negara-negara kaum muslim yang menjadi obyek penindasan dan penjajahan terutama yang dilakukan oleh jaringan kapitalisme global. Karena itu, banyak pemikir muslim kontemporer yang apresiatif dengan filsafat Marxisme kemudian mensintesakannya dengan ajaran Islam sebagai dasar perjuangan untuk membebaskan masyarakat muslim dari berbagai belenggu penindasan. Meski

mereka juga memberikan catatan-catatan kritis terhadap poin-poin tertentu dari Marxisme.

Salah satu pemikir teologi pembebasan di kalangan umat Islam adalah Asghar Ali Engineer. Ia salah satu tokoh filsuf muslim yang tidak mengenal lelah berijtihad untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai dasar Islam dengan tradisi pemikiran lain seperti Marxisme sebagai dasar perjuangan kaum Muslim melawan dan membebaskan dirinya dari struktur yang menindas. Dengan elaborasi dan eksplorasi intelektualnya, Engineer muncul sebagai tokoh teologi pembebasan dalam Islam. Tulisan ini akan menjawab satu persoalan: bagaimana sebenarnya konsep teologi pembebasan Asghar Ali Engineer dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan politik di Indonesia kontemporer?.

Metode

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka atau kualitatif deskriptif (Kaelan, 2005:270) dengan pendekatan kepustakaan. Data kepustakaan yang dimaksud adalah naskah, buku, jurnal dan lainnya yang menyajikan informasi tentang Asghar Ali Engineer terutama pemikirannya di bidang teologi pembebasan.

Data primer tentu saja adalah karya-karya Asghar Ali Engineer sendiri terutama Teologi Pembebasan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu data sekunder adalah naskah atau buku yang ditulis oleh penulis lain yang mendukung pemikirannya Engineer.

Data yang diperoleh dari sejumlah literatur ini, baik yang primer maupun yang sekunder, direduksi sedemikian rupa dalam bentuk abstraksi dan ringkasan. Lalu setelah itu dilakukan penyusunan dan pengkategorian unsur-unsur data sambil melakukan pengkodean. Setelah itu, data dianalisis kemudian ditulis dan disajikan secara logis dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

Temuan

1. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer merupakan tokoh intelektual Islam progresif dari India yang dikenal luas dalam jagat pemikiran Islam karena gagasannya mengenai teologi pembebasan Islam. Sebagaimana para pemikir progresif Muslim lainnya semisal Hassan Hanafi, Engineer juga menekankan pembebasan dari penindasan struktural melalui reinterpretasi terhadap teks-teks Islam, serta keberpihakan terhadap kaum tertindas.

Salah satu aspek menarik dari diskursus Engineer adalah keterkaitannya—baik secara eksplisit maupun implisit—dengan pendekatan Marxis, terutama dalam kritiknya terhadap ketimpangan sosial dan struktur kekuasaan yang dominatif dan hegemonik. Engineer dilahirkan pada 10 Maret 1939 di Salumber, Rajahstan, India sebagai anak dari tokoh ulama Bohra, Shaikh Qurban Hussain. Sejak kecil Engineer sudah belajar ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir al-Qur'an, ta'wil (the hidden meaning of Qur'an), fikih, hadis dan bahasa Arab (Sikand, 2004).

Dia lulusan Teknik Sipil dari Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh dan bekerja sebagai insinyur selama 20 tahun di Bombay Municipal Corporation, sebelum akhirnya mengundurkan diri dengan suka rela, untuk melibatkan dirinya pada gerakan reformasi

Bohra. Pendidikan formal Engineer dalam bidang teknik sipil tidak menghalanginya untuk mendalami studi-studi keislaman secara otodidak.

Berkat perhatiannya yang besar terhadap cita-cita transformasi keislaman, ia memutuskan aktif dalam berbagai forum interfaith dialogue serta mendirikan Institute of Islamic Studies dan Centre for Study of Society and Secularism di Mumbai, yang menjadi pusat aktivitas intelektual dan sosialnya (Engineer I. , 2013).

Dia mulai memainkan perannya sebagai seorang pemimpin dalam gerakan reformasi 1972 ketika pembrontakan meletus di Udaipur. Secara bulat dia dipilih sebagai Sekjen The Central Board of Dawoodi Bohra Community dalam kongresnya yang pertama pada 1977 di Udaipur. Keterlibatannya dalam komunitas ini membentuk sistem pemahamannya terhadap bagaimana agama dapat dijadikan alat dominasi dan eksploitasi. Engineer, seperti dikatakan Irfan Engineer, kemudian mencurahkan hidupnya untuk membela hak-hak kaum tertindas, perempuan, dan minoritas dengan merumuskan pendekatan teologis yang membebaskan, inklusif, dan progresif (Engineer I. , 2013).

Namun, pada 2004 dia dipecat sebagai Sekjen organisasi tersebut karena berani mengkritik ketetapan-ketetapan agama. Pada tahun 1980, dia mendirikan Institute of Islamic Studies di Mumbay untuk membangun ruang bagi para Muslim progresif di India dan tempat-tempat lainnya. Berikutnya, pada 1980-an dia menulis secara luas tentang hubungan antara Muslim dan Hindu dan berkembangnya kekerasan komunal di India.

Engineer juga telah menjadi corong dalam menyuarkan gerakan Dawoodi Bohra yang progresif melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya. Pada 1993, dia mendirikan Pusat Studi Masyarakat dan Sekulerisme (Center for Study Society and Seculerism) untuk mensosialisasikan keharmonisan sosial.

Selama beberapa tahun, dia menulis lebih dari 50 buku dan banyak artikel di berbagai jurnal internasional, dan mendirikan Jaringan Aksi Muslim Asia ('Asian Muslim Action Network'), direktur Institute Studi Islam (Institute of Islamic Studies) dan pemimpina 'Center for Study of Society and Secularism' di Mumbai, yang dia bekerja secara dekat dengan para sarjana dan ilmuwan, Ram Puniyani.

2. Menyuarakan Teologi Pembebasan Islam

Dia mulai dikenal sebagai pemikir teologi pembebasan dalam dunia Islam setelah menerbitkan bukunya berjudul *Islam And Liberation Theology-Essay on Liberative Elements in Islam* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi *Islam dan Teologi Pembebasan* oleh penerbit Pustaka Pelajar. Dalam bukunya ini, Engineer mengeksplorasi lebih jauh soal Islam sebagai spirit pembebasan. Secara konseptual, ia membangun pemikirannya ini dengan mengelaborasi nilai-nilai Islam baik secara normatif maupun historis.

Namun demikian, ia juga menimba gagasan dari tradisi lain, termasuk filsafat Marxisme. Dalam hal ini, Engineer tidak menerima atau menolak sepenuhnya Marxisme. Ada poin-poin tertentu dari Marxisme yang dia ambil sebagai inspirasi dan pelengkap gagasannya juga ada hal-hal tertentu yang dia kritik bahkan dia tolak.

Teologi pembebasan Islam yang digagas Engineer berangkat dari keyakinan bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, baik spiritual maupun sosial. Menurutnya, wahyu ilahi dalam Al-Qur'an bukan sekadar teks normatif, melainkan juga dokumen historis yang harus dimaknai dalam konteks perjuangan melawan kezaliman (Engineer, Asghar Ali, 2001).

Engineer menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan (adl), persamaan (musawah), dan kasih sayang (rahmah) harus menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang bebas dari penindasan struktural. Dalam hal ini, ia sejalan dengan gagasan teolog Kristen seperti Gustavo Gutiérrez, namun tetap berbasis pada khazanah Islam (Engineer, Asghar Ali, 2001).

Titik tolak Engineer untuk merumuskan teologi pembebasan dalam Islam itu adalah tauhid. Tauhid, dalam pandangan Engineer bukan hanya sebuah penegasan terhadap keesaan Tuhan, melainkan lebih dari itu adalah kesatuan kemanusiaan. Efek pembebasan tauhid antara lain merupakan kelanjutan langsung pandangan kemanusiaan yang melekat dan menjadi konsekuensinya (Madjid, 2005).

Engineer membedakan antara teologi tradisional dengan teologi pembebasan. Teologi pembebasan, menurut Engineer, menafsirkan tauhid bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan manusia (unity of mankind) yang tidak akan benar-benar terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (classless society) (Engineer, 2000). Dalam analisisnya Engineer, perbedaan kelas dalam masyarakat merupakan sumber dari berbagai ketimpangan dan ketidakadilan. Selama dunia masih terkotak-kotak secara hierarkhis dalam bentuk kelas,---kelas penindas versus kelas tertindas--- maka kesatuan masyarakat tidak akan terwujud. Ketika kesatuan masyarakat dalam kesetaraan dan kesederajatan tidak terwujud, cita-cita keadilan sosial hanya menjadi mimpi dan angan-angan belaka.

Tauhid adalah nilai dasar dan paling prinsip dalam Islam. Segala prilaku dan ajaran-ajaran Islam apapun dalam Islam mempunyai dasar teologisnya dan dasar teologi itu adalah tauhid. Syari'at apapun yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai dasar tauhid, maka dia sendirinya akan batal. Karena tauhid adalah nilai terpenting dalam Islam maka ia harus mempunyai konsekuensi etis dan politis dalam ranah sosial: terhapusnya struktur sosial yang tidak adil dan timpang. Selama dalam sebuah masyarakat masih dijumpai struktur sosial yang timpang dan tidak adil, maka nilai-nilai tauhid belum teraktualisasikan dengan sebenar-benarnya dalam masyarakat tersebut.

Karena itu Islam dalam pandangan teologi pembebasan merupakan agama yang diturunkan untuk melawan segala penindasan, penjajahan dan dominasi apapun yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan bagi Engineer merupakan ukuran utama dalam Islam. (Enguneer, 2000:7). Iman dalam konteks ini merupakan sebuah gerak perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas dan tidak adil. Semangat mewujudkan masyarakat yang adil, tanpa penindasan dan penjajahan adalah wujud nyata dari panggilan iman. Begitu juga, membela masyarakat lemah dan tertindas, masyarakat yang hak-haknya dijarah dan dieksploitasi oleh kerakusan dan keangkuhan kekuasaan, adalah wujud iman yang paling konkret.

Karena itu keadilan, yang ditandai tidak adanya penindasan dan eksploitasi apapun merupakan indikasi utama bagi masyarakat Islam. Masyarakat bisa disebut Islam bukan karena kemegahan ritualitasnya, melainkan lebih pada sisi keadilan sosialnya. Masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi anggota lainnya yang lemah dan tertindas, menurut Engineer, tidak bisa disebut sebagai masyarakat Islam, meskipun mereka menjalankan ritualitas Islam (Engineer, 2000).

Dari situ terlihat jelas bahwa teologi pembebasan yang diidealkan oleh Engineer adalah seprangkat pengetahuan tentang keimanan yang berorientasi praksis. Teologi pembebasan yang dimaksud Engineer bersifat konkret, kontekstual, dan praksis. Ia berada pada realitas kekinian dan bertolak dari kondisi sosial yang ada. Ia juga merupakan refleksi dan aksi iman dan amal—sebuah produk pemikiran yang diikuti dengan praksis pembebasan. Dalam hal ini, Engineer tidak hanya mendasarkan konsep teologinya ada ajaran-ajaran normatif Islam, melainkan juga pada fakta-fakta historis dan sosiologis Islam.

Kondisi riil masyarakat Islam sejak era Nabi Saw.hingga saat ini menjadi dasar utama Engineer dalam merumuskan teologi pembebasan. Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menurut Engineer, sejatinya untuk membongkar status quo serta membebaskan kelompok yang tertindas dan dieksploitas. Islam bagi Engineer merupakan ideologi keagamaan yang sepenuhnya telah terbukti mengubah masyarakatnya sejak kelahirannya, namun tetap mempertahankan sifat-sifat khas masyarakat tersebut yang tidak bertentangan dengan sistem nilai Islam (Engineer, 2000).

Diskusi

1. *Prinsip-Prinsip Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer*

Teologi pembebasan dalam Islam versi Engineer memiliki tiga ciri utama: (1) kontekstualisasi teks-teks agama dalam realitas sosial; (2) reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin yang bersifat eksklusif dan patriarkal dan (3) keberpihakan pada kaum miskin, perempuan, dan minoritas (Engineer, Asghar Ali, 2001).

Ada beberapa poin atau prinsip-prinsip dasar dalam teologi pembebasannya Asghar Ali Engineer. Menurut Enginner teologi pembebasan itu terdiri dari hal-hal prinsip: pertama,dimulai dengan melihat manusia di dunia dan akhirat. Kedua, teologi ini tidak menginginkan status quo yang melindungi golongan kaya yang berhadapan dengan golongan miskin. Dengan kata lain teologi pembebasan itu anti kemapanan (establishment), apakah itu kemapanan religius maupun kemapanan politik. Ketiga, teologi pembebasan memainkan peranan dalam membela kelompok yang tertindas dan tercerabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan golongan yang menindasnya. Keempat, teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri (Engineer, 2000).

Dari pemaparan prinsip-prinsip dasar teologi pembebasan tersebut bisa diuraikan lebih jauh bahwa teologi pembebasan merupakan teologi yang bertolak dari pengalaman

manusia beserta kompleksitas masalah dan kehidupannya. Eksistensi manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat menjadi acuan penting dan landasan utama dalam memformulasikan teologi pembebasan.

Alasannya jelas bahwa orientasi dan tujuan utama teologi pembebasan adalah mengenali problem-problem riil masyarakat, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan pada tahap akhirnya berusaha menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan berbasis pada prinsip-prinsip teologi. Karena itu, seperti yang telah disinggung bahwa teologi pembebasan bagi Engineer merupakan teologi yang praksis dan aktual.

Selain itu, teologi pembebasan juga bersifat progresif, transformatif dan revolusioner. Engineer telah menegaskan bahwa teologi pembebasan itu anti status quo, baik dalam konteks agama maupun politik. Status quo adalah prinsip yang dipegang oleh kelas atau kelompok yang berkuasa baik dalam kekuasaan agama maupun politik. Setiap kelompok apapun yang telah berhasil menancapkan kekuasaannya, maka cenderung pro status quo, mereka lebih berusaha mempertahankan keamanan dan ketetapan kekuasaannya meskipun kekuasaan yang dijalankan sangat menindas. Karena itu, kelompok yang pro status quo secara otomatis menentang segala perubahan dan pembaharuan. Pasalnya, perubahan dan transformasi bisa menjadi faktor runtuhnya kekuasaan status quo. Kelompok-kelompok agamawan yang konservatif seringkali menolak adanya pembaharuan karena dirasa berpotensi mengancam posisi kekuasaannya. Untuk melanggengkan status sosial dan kekuasaannya itu tak jarang kelompok-kelompok konservatif memakai Tuhan sebagai topeng.

Begitu pula para penguasa politik. Mereka yang pro status quo seringkali membrangus gerakan kelompok progresif yang berusaha menggugat, mempertanyakan dan menentang kebijakannya. Sistem politik yang diterapkan, kemudian dijalankan secara aboslut. Hal-hal yang dinilai mengancam keamanan kekuasaan, diposisikan sebagai pihak yang berbahaya dan karena itu harus dibungkam. Kelompok-kelompok pro status quo inilah yang kemudian muncul sebagai diktator. Sistem sosial, politik bahkan agama yang semacam ini jelas bertentangan dengan semangat teologi pembebasan, yang memiliki misi sebaliknya yakni menggugat keberadaan otoritas status quo.

Selanjutnya, masih berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemikirannya Engineer, teologi pembebasan mempunyai ideologi pembelaan yang jelas, yakni pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas (mustadh'afin). Karena itu, musuh utama teologi pembebasan adalah kelas-kelas penindas (mustakbirin) yang merampas dan menghisap hak-hak rakyat. Bukan dinamakan teologi pembebasan kalau membiarkan atau malah melegalkan aksi-aksi penindasan dan penjajahan.

Dalam konteks sekarang, seringkali terjadi dalam sebuah negara konspirasi antara penguasa dan pemilik modal untuk menindas rakyat. Hak-hak kehidupan rakyat dipangkas dan dihisap hingga ke tulang-belulanginya oleh penguasa-penguasa korup yang berselingkuh dengan pihak pemodal. Rakyat sebagai pihak tertindas seringkali sendirian dalam menghadapi dua kelas penindas yang bersatu ini.

Lalu terakhir, teologi pembebasan mengafirmasi soal pengalaman manusia. Segala yang terjadi di dunia, terutama dalam kehidupan sosial, sepenuhnya hasil rekaan dan ciptaan manusia dan bukannya takdir. Karena bukan takdir, maka kondisi-kondisi itu masih terbuka untuk diperdebatkan, digugat dan dirubah. Apalagi sistem ekonomi dan politik yang ada jelas merupakan sebuah fenomena struktural-sistemik yang sengaja dirancang dan dibangun sedemikian rupa oleh kelas-kelas penindas.

Maka dari itu, kemlaratan, kemiskinan dan ketidakadilan yang menghimpit masyarakat kecil secara luas sekarang ini bukan hasil takdir; bukan muncul secara alamiah, melainkan hasil kerja, desain dan rancangan yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan terkoordinasi dari para penguasa politik maupun penguasa ekonomi.

Singkatnya, kelas-kelas penindas memang sengaja menciptakan kondisi kemlaratan dan kemiskinan bagi orang-orang kecil. Akses-akses dan alat-alat produksi dikuasai sedemikian rupa oleh mereka sehingga membuat orang-orang lemah dan tertindas menjadi tidak berdaya baik secara ekonomi maupun politik.

2. Islam dan Marxisme dalam Teologi Pembebasan

Konsep teologi pembebasan yang diusung Engineer juga bersinggungan dengan Marxisme. Engineer meyakini bahwa Islam sejak di awal-awal sejarahnya adalah agama yang memihak kaum lemah: budak, perempuan, dan kelompok miskin. Dalam Islamic Theology of Liberation, ia menegaskan bahwa misi Islam adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, sebagaimana terlihat dalam perintah zakat, larangan riba, dan ajaran egalitarian dalam Al-Qur'an. Pandangan Engineer ini sejajar dengan semangat Marxisme yang menolak akumulasi kapital oleh segelintir elite dan menuntut distribusi kekayaan yang lebih adil (Engineer, Asghar Ali, 2001).

Meski demikian, Engineer menolak keras reduksi agama menjadi ideologi materialistik sehingga meminggirkan dimensi spiritual seperti yang lazim berlaku dalam Marxisme ortodoks. Aspek spiritualisme dalam agama dipandang sebagai 'candu' yang meninabobokan masyarakat tertindas. Sebaliknya, Engineer menekankan bahwa nilai spiritual dan etika profetik dalam Islam adalah fondasi penting dalam gerakan pembebasan, dan tidak bisa dilepaskan dari dimensi transenden (Engineer, Asghar Ali, 2001). Di sinilah letak perbedaan epistemologis antara Engineer dan Marxisme ortodoks: jika Marxisme menolak agama karena dianggap sebagai "candu", maka bagi Engineer, agama justru adalah katalis bagi pembebasan (Marx, 1994).

Pada titik itulah Engineer mengkritik keras Marxisme. Filsafat Marxisme lebih banyak menggunakan idiom dan wacana untuk meningkatkan taraf ekonomi belaka tanpa memperkaya spiritual and budaya masyarakat. Marxisme seperti ini kata Engineer sesungguhnya hanya mencerminkan pandangan dan ideologi Marxis kelas menengah dan elit. Pada saat yang sama kaum buruh dan kelas proletary dihubungkan dengan Marxisme untuk mencapai tujuan ekonomi terbatas dan mereka dijauhkan dari sistem budaya dan spiritualnya sendiri. Hal inilah, kata Engineer, yang membuat Marxisme kalah menarik dengan gerakan-gerakan ideologi lain seperti fundamentalisme, radikalisme dan

kelompok-kelompok reaksioner keagamaan karena yang terakhir ini lebih bisa memenuhi dahaga spiritual masyarakat.

Maka, lanjut Engineer, Marxisme perlu mengembangkan pendekatan religio-kultural dan ekonomi secara menyeluruh yang berakar pada etos dan tradisi masyarakat setempat. Konsekuensinya, Marxisme menurut Engineer tidak boleh mengesampingkan agama. Menganggap agama sebagai candu lalu mencampakkannya begitu saja, bagi Engineer, merupakan pola pikir dan pendekatan yang dangkal. Engineer menegaskan bahwa agama justru instrument penting yang bisa difungsikan sebagai candu maupun semangat gerakan revolusioner. Agama menjadi candu, seperti yang dikatakan Marx, hanya jika menjadi lenguhan kaum tertindas. Padahal, agama sejatinya tidak selalu menjadi sekedar lenguhan kaum tertindas, melainkan juga bisa menjadi pedang di tangan mereka (Engineer, 2000).

Meski demikian, bukan berarti tidak ada titik temu antara teologi pembebasan yang diusung Engineer dengan filsafat Marxisme. Salah satu titik temu paling penting antara teologi pembebasan Engineer dengan Marxisme adalah kritik dan perlawanan terhadap institusi agama sebagai bagian dari struktur hegemonik dan menindas. Marx menilai bahwa agama seringkali menjadi alat legitimasi bagi status quo dan kekuasaan opresif (Marx, 1994). Kritik serupa juga disuarakan Engineer. Seperti dikatakan Irfan Engineer, Engineer melancarkan serangan dan kritik terhadap otoritas keagamaan dalam komunitas Bohra yang menurutnya menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaan hierarkis dan menindas kebebasan berpikir (Engineer I. , 2013).

Dalam kerangka ini, Engineer memanfaatkan semangat emansipatoris yang ada dalam Marxisme untuk mengkritik penyalahgunaan agama oleh elite agama yang korup dan menyeleweng. Ia menolak keras dan memberikan kritik tajam terhadap pemusatan kekuasaan agama di tangan ulama ortodoks yang anti-kritik, dan mendorong pemahaman terhadap al-Qur'an yang kontekstual serta inklusif terhadap realitas sosial (Engineer, Asghar Ali, 2004).

Engineer juga mengakui, pendekatan agama untuk mengkaji sejarah umat Islam memang sangat penting, namun pendekatan agama saja tidak akan memadai untuk memotret perkembangan sejarah umat Islam yang semakin kompleks. Karena itu, Engineer melihat pentingnya mengkaji sejarah Islam dengan menggunakan paradigma sosiologi-Marxis: materialisme historis (Arif, 2001).

Apa yang diambil dari Engineer dari Marxisme bukanlah sisi doktrinalnya, melainkan lebih pada sisi metode berpikir atau logikanya (Engineer, Asghar Ali, 1999). Metodologi dan logika berpikir Marxisme di mata Engineer sangat tepat digunakan untuk menganalisa sejarah perkembangan perkembangan masyarakat Islam. Engineer sangat mengecam para analis sosial Marxis yang mencoba memotret perkembangan masyarakat Islam dengan kaca mata doktrin Marxisme dan bukannya melalui metodologi-nya.

Salah satu yang dikritik keras oleh Engineer adalah penjelasan seorang Marxis dalam buku *A Short History of The World* (1974) yang dieditori oleh A.Z.Manfred. Dalam uraian di dalamnya disimpulkan bahwa model sosio ekonomi masyarakat Arab abad ke-7

adalah feodal (Manfred, 1974). Feodalisme yang kemudian menyebabkan munculnya gerakan keagamaan baru (Islam).

Namun, menurut Engineer, kesimpulan tersebut jelas tidak tepat karena tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang sebenarnya tentang masyarakat Arab abad ke-7. Isi buku itu hanya terpengaruh oleh doktrin tentang materialisme historisnya Marx. Sebaliknya, menurut Engineer, Makkah bila dilihat dari perspektif materialisme historis maka perlu dikaji latar belakang sejarah dan faktor-faktor lainnya seperti geografi, budaya, politik dan ekonomi. Dalam materialisme historis terdapat hubungan antara basis struktur yaitu ekonomi dan super struktur yaitu sektor-sektor lainnya seperti agama, politik, budaya dan sejenisnya.

Dalam doktrinnya Marx, basis struktur merupakan penyebab utama munculnya supra struktur. Agama, politik, budaya, Pendidikan, ilmu pengetahuan dan yang lainnya eksis karena faktor ekonomi. Namun, bagi Engineer, basis struktur bukan satu-satunya faktor dalam masyarakat Arab. Lembaga-lembaga keagamaan dan kebudayaan, yang muncul dari kekuatan-kekuatan serta hubungan produksi pada masa awal, mendapatkan otonominya sendiri yang terus mempengaruhi lembaga-lembaga sosial ekonomi pada masa berikutnya (Engineer, Asghar Ali, 1999).

Dari analisisnya itu pula Engineer mengatakan bahwa kondisi Makkah pada awal Islam bukan sebuah kawasan pertanian yang menjadi basis budaya feodalistik, melainkan justru pusat perdagangan dunia internasional. Inilah yang kemudian menimbulkan penindasan kapitalisme di tanah Arab yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Dominasi dan monopoli ekonomi oleh kaum kapitalis Arab ini yang melatarbelakangi hadirnya agama Islam.

Semasa Nabi Muhammad Saw. hidup dan beberapa dekade sesudahnya, kata Engineer, Islam menjadi kekuatan revolusioner. Para sejarawan, membuktikan bahwa Nabi Saw. sebagai utusan Allah menggulirkan tantangan yang membahayakan saudagar-saudagar kaya di Makkah. Saudagar-saudagar ini berasal dari suku yang berkuasa di Makkah, yaitu suku Quraisy. Mereka menyombongkan diri dan mabuk kekuasaan. Mereka melanggar norma-norma keuskuan dan tidak menghargai fakir miskin (Engineer, Asghar Ali, 1999).

Karena itu, dalam sejarahnya, Islam diturunkan lebih sebagai medium dan kekuatan untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajahan dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini Islam adalah perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, terutama yang dilembagakan oleh struktur kekuasaan yang lalim.

Dalam sejarahnya, perlawanan terhadap struktur kekuasaan lalim dan tidak adil ini juga terjadi di berbagai belahan dunia Islam termasuk di Nusantara pada abad ke-18 di masa Kasultanan Mataram Islam. Berbeda dengan kelompok fikih yang saat itu mendukung pemerintah (Kasultanan Mataram Islam), kaum tasawuf dan pemimpin tarekat justru menentang penguasa yang memicu terjadinya pemberontakan di sejumlah tempat, yang sebagai akibatnya para ulama tarekat dan kaum sufi ini banyak dibakar hidup-hidup atas perintah Sultan (Wahid, 2011).

Maraknya perlawanan berbasis agama (Islam) itu menunjukkan kesadaran sosial kaum agamawan bahwa sistem dan struktur yang ada mengalami pembusukan sehingga melahirkan berbagai penindasan, eksploitasi dan hegemoni terhadap masyarakat luas. Sistem dan struktur sosial yang menindas ini tak jarang ditopang oleh agama sehingga agama justru menjadi bagian dari kekuatan penindas alih-alih sebagai kekuatan pembebas. Selama ini agama dipandang sebagai fakta transenden yang bersifat idealistik, sehingga agama nampak begitu sempurna dalam ruang imajiner namun buta terhadap segala kebobrokan di ranah sosial.

Akibatnya, pemikiran kritis yang berorientasi pada perubahan dan transformasi sosial menjadi terabaikan. Buat apa pemikiran kritis dan transformatif, bukankah agama sudah sedemikian sempurna? Padahal kesempurnaan dalam konteks idealistik seperti ini sangat tidak selaras dengan kondisi riil dan historis. Bisa jadi di alam ideal kehidupan agama nampak begitu sempurna, namun dalam kenyataan sosiologis, kehidupan agama jelas-jelas banyak diwarnai ketimpangan, ketidakadilan, penindasan, penyelewengan dan sebagainya.

Meski demikian, dalam titik temu dan persinggungan antara Islam dan Marxisme itu, Engineer juga mengkritik Marxisme yang cenderung mengabaikan agama. Pandangan Marxisme soal agama sebagai candu, bagi Engineer, merupakan hal yang salah. Agama menurut Engineer mempunyai dua wajah: satu sisi sebagai candu sebagaimana dikatakan Marx itu, dan satu sisi sebagai ideologi revolusioner. Dalam pengamatan Engineer, sebagian gerakan revolusi di dunia ini digerakkan oleh agama. Ketika Marxisme hanya sepenuhnya bertopang pada materialisme tanpa menggandeng agama, di situlah letak kegagalan Marxisme dalam mewujudkan transformasi sosial.

Semodern apapun sebuah masyarakat yang telah berabad-abad bergelut dengan spiritulitas baik yang termanifestasikan dalam bentuk agama-agam formal maupun dalam keyakinan-keyakinan lokal (aliran kepercayaan), tidak mungkin bisa terpisahkan tradisi spiritualitas dari kehidupan mereka atas nama ideologi apapun, termasuk Marxisme. Karenanya, bagi Engineer, supaya Marxisme bisa relevan dan bisa diterima oleh masyarakat religius, sisi spiritualitas dan rohani dari masyarakat tidak boleh diabaikan, melainkan harus secara kreatif diakomodir.

3. Relevansi Teologi Pembebasan dalam Politik Indonesia Kontemporer

Teologi pembebasan Engineer yang dipadu dengan semangat emanisipasi dalam Marxisme sesungguhnya layak untuk dijadikan kerangka analisis dan ideologi gerakan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia kontemporer. Melihat gejala sosial politik Indonesia sekarang, agama nampak mengalami reduksi dan distorsi. Peran agama di Indonesia sekarang sekedar sebagai alat dukung- mendukung dalam politik elektoral. Agama kemudian bukan menjadi ruh atau spirit pembebasan (liberation spirit) sosial melainkan justru menjelma menjadi kekuatan untuk melanggengkan status quo.

Pesan pokok dari teologi pembebasan yang disuarakan Engineer adalah upaya untuk menegakkan keadilan sosial (social justice) dan persamaan (equality) di antara

masyarakat, utamanya dalam sektor ekonomi, sebagai nilai utama sekaligus esensi Islam. Fungsi Islam secara sosial adalah untuk membebaskan dari beragam penindasan dan praktik ketidakadilan terutama sistem ketidakadilan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh pihak status quo.

Ketika Islam sekedar dijadikan elemen pendukung terhadap kekuasaan, seperti yang terjadi dalam praktik politik Indonesia kontemporer, secara eksplisit agama juga turut berperan melanggengkan ketidakadilan dan ketimpangan yang dikonstruksi oleh para aktor kekuasaan, mengingat dalam praktek politik Indonesia kontemporer, kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dijalankan lebih berpihak kepada kelompok pemodal daripada kepada rakyat.

Sudah menjadi wacana umum bahwa kebijakan ekonomi kapitalis yang pro pemodal ini lebih berorientasi pada pertumbuhan dan lebih mengabaikan masalah pemerataan. Kebijakan ekonomi yang timpang inilah yang kemudian menimbulkan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sistem ekonomi yang lebih pro pemodal seperti ini juga bertentangan dengan konstitusi.

Dalam pasal 33 UUD 1945 memberi penegasan yang intinya bahwa kebijakan pembangunan ekonomi didasarkan atas sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada semangat keadilan, kesamaan dan kekeluargaan. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya, pasal 33 di atas memang bukan didesain untuk membangun sistem ekonomi yang sepenuhnya komunitarianisme.

Pasal 33 itu dirancang untuk membangun sistem ekonomi jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme. Sistem ekonomi jalan tengah sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 itu oleh Bung Hatta disebut dengan sistem ekonomi sosialis kooperatif, ekonomi kerakyatan atau yang dikenal dengan nama koperasi (Hatta, 1983).

Meski pasal 33 UUD 1945 itu bukan termasuk sistem ekonomi komunisme sebagaimana yang berlaku di negara-negara komunis secara umum, tapi di dalamnya, secara konstitusional, ditegaskan tentang semangat komunalitas dan kekeluargaan di mana pembangunan perekonomian Indonesia haruslah bertumpu pada semangat kerakyatan, keadilan, kesamaan dan kekeluargaan, yang semua nilai ini secara substansial mencerminkan semangat keislaman.

Namun dalam prakteknya, nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 itu banyak diabaikan dan dicampakkan oleh penguasa, di mana sistem perekonomian yang dijalankan pemerintah Indonesia sejak Orde Baru hingga detik ini cenderung kapitalistik.

Sistem kebijakan perekonomian Indonesia yang cenderung kapitalistik itu bisa dilihat melalui salah satu kasus, yakni kasus agraria. Persoalan agraria belakangan ini di tanah air terus memanas karena persoalan krusial ini seringkali melahirkan konflik antara rakyat versus pemerintah plus pemodal.

Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dilaporkan setiap hari terjadi dua konflik agraria (Utama, 2018). Pada 2017 setidaknya terjadi 659 konflik dalam setahun. Angka itu meningkat hampir 50% dibandingkan 2016. Persoalan agraria tahun 2017 mencakup lahan seluas 520 ribu hektare dan melibatkan 652 ribu kepala keluarga.

Dua konflik agraria di antaranya terjadi di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Kulon Progo, sejak 2017, sebagian warga lokal menolak rencana pemerintah membangun bandara internasional. Namun akhirnya akibat tekanan yang begitu kuat baik dari penguasa maupun dari pemodal, masyarakat Kulon Progo terpaksa harus mengalah. Proyek bandara itu telah berhasil dijalankan dengan mengusir puluhan ribu warga yang telah lama mendiami daerah itu. Mereka harus angkat kaki secara massal dari kampung halamannya ke wilayah lain demi pembangunan Bandara Internasional.

Sementara di Sumba Barat, konflik agraria terjadi di pesisir pantai Marosi yang menewaskan satu warga lokal. Pangkal masalahnya adalah PT Sutra Marosi Kharisma dituding warga tidak memiliki legalitas membangun hotel di kawasan mereka. Selain itu, persoalan agraria juga terjadi dalam bentuk alih fungsi lahan menjadi kawasan pabrik seperti yang ada di Kendeng.

Akibat dari kebijakan eksploitasi alam yang tanpa batas tersebut adalah maraknya kerusakan lingkungan yang parah seperti hilangnya kawasan hutan untuk pembangunan geotermal panas bumi seperti di kawasan hutan Gunung Slamet, hilangnya keragaman hayati seperti dalam kasus pembangunan PLTU di Batang, surat alih fungsi lahan yang bermasalah, dan berbagai persoalan agraria lainnya (<http://bem.unsoed.ac.id/agra-kapital/:29/06/2017>)

Konflik agraria di Indonesia sebenarnya masalah lama. Sebagaimana dijelaskan Tuong Vu dalam esainya, *Indonesia's Agrarian Movement: Anti-Capitalism at a Crossroads*, bahwa persoalan agraria bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dekade pertama setelah kemerdekaan (1949), lanjut Tuong Vu, terjadi gerakan spontan oleh kaum petani yang tak punya tanah untuk menduduki tanah perkebunan. Kemudian pada 1960-an, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah memimpin petani dalam kampanye untuk melakukan aksi kekerasan demi merebut tanah yang secara hukum menjadi milik mereka sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria; UUPA) (Tuong, 2009).

Menanggapi persoalan agraria ini, ketika reformasi meletus pada 1998, muncullah beragam kelompok tani (*farmer's union*). Di antara kelompok tani yang mempunyai jaringan skala nasional di Indonesia yang lahir di awal-awal reformasi ini adalah Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Organisasi ini bergerak bersama dengan sejumlah LSM lainnya yang mempunyai concern pada persoalan yang sama baik yang berskala lokal maupun nasional, di antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang didirikan pada pertengahan 1990-an. Kemudian juga organisasi lingkungan dan sumber daya alam, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).

Para petani telah mendapatkan dukungan dan advokasi dari LSM-LSM ini bahkan juga mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari NGO-NGO yang bergerak di bidang HAM dan bantuan hukum terutama di masa-masa Orde Baru, ketika iklim politik masih diwarnai oleh otoritarianisme dan represifisme (Vu: 26/02/2019). Namun, meski Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh Orde Reformasi, persoalan agraria bukan berarti telah selesai.

Alih-alih selesai, persoalan ini sekarang justru semakin kompleks dan parah. Faktornya lagi-lagi adalah adanya kolaborasi kepentingan antara pemerintah dan pemodal, sehingga mengorbankan rakyat kecil, utamanya petani. Selama penguasa dan pemodal terus berkomplot atau berkonspirasi, selama itu pula persoalan agraria tampaknya tidak akan berakhir, sebab salah satu sumber daya yang ditarget oleh para pemodal untuk pengembangan industri atau usahanya adalah lahan atau tanah.

Di sinilah kemudian sistem ekonomi kapitalisme yang lebih berpihak kepada pemodal sejak dulu memang menjadi faktor utama lahirnya beragam ketimpangan, penindasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat kecil. Persoalan-persoalan agraria tersebut makin menggejala, penyebab utamanya tiada lain adalah semakin menguatnya praktek-praktek liberalisme dan kapitalisme ekonomi yang secara perlahan-lahan menyebabkan kepincangan dalam pembagian sumber-sumber daya untuk membangun kemakmuran bersama (<http://bem.unsoed.ac.id/agra-kapital/> (29/06/2017)).

Desain konstruksi sistem dan mekanisme kapitalistik inilah yang telah melahirkan banyaknya eksploitasi sumber-sumber ekonomi khususnya sumber daya alam, seperti tanah dan tambang, demi memberikan keuntungan pada segelintir orang, sehingga membuahakan dampak ekologis dan sosial yang luar biasa destruktif, di antaranya adalah rusaknya alam dan terjadinya peminggiran, marginalisasi dan segregasi secara sistematis dan masif terhadap masyarakat bawah.

Dengan problem seperti itu, pertanyaan yang muncul adalah di mana dan bagaimana peran agama? Dalam sistem sosial yang timpang dan penuh ketidakadilan akibat dominasi kapitalisme itu, apakah agama hanya mencukupkan diri untuk mengurus persoalan-persoalan privat dan tersier; apakah agama sekedar bergerak mengurus Tuhan, surga, neraka, infotainment, jenggot, sunnah rasul, rambut gondrong, tahlilan, sholawatan, bid'ah, khurafat, poligami dan persoalan-persoalan artifisial lainnya? Apakah agama hanya cukup memerankan diri sebagai elemen pendukung dalam politik elektoral yang jauh dari nilai-nilai kerakyatan dan keadilan itu?

Dalam ketimpangan sosial akibat hegemoni dan dominasi akut kapitalisme itu, agama di Indonesia, khususnya Islam, seharusnya mampu menjadi kekuatan progresif-revolusioner untuk melakukan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkemanusiaan. Merupakan sebuah penistaan terhadap agama, apabila praktik agama hanya diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual yang lebih mengarah pada kesalehan individual sementara kebobrokan dan ketidakadilan sosial terjadi di mana-mana. Agama seolah menutup mata dari problem-problem sosial yang menimpa masyarakat luas terutama wong cilik.

Jika agama sudah menutup mata dari persoalan-persoalan sosial yang menimpa masyarakat maka saat itulah lonceng kematian agama. Singkatnya, agama mengalami penistaan dan kematian justru ketika oleh umatnya hanya digunakan untuk mengurus Tuhan yang sudah serba maha segala-galanya dan bukannya digunakan untuk mengurus manusia dan masyarakat, terutama mereka yang lemah dan tertindas, yang secara nyata diliputi oleh beragam keterbatasan, kelemahan dan ketidakberdayaan.

Maka, sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan agama sebagai kekuatan progresif-revolusioner yang peka dengan persoalan-persoalan sosial-kemanusiaan kemudian diperlukan sebuah landasan teoritik bernama teologi pembebasan sebagaimana yang diintrodusir oleh Asghar Ali Engineer. Dalam konsep teologi pembebasan ini, Islam nampak perlu diberi suntikan Marxisme berupa konsepnya tentang Materialisme Historis dan Materialisme Dialektis untuk menegaskan nilai-nilai transformasi Islam ke dalam realitas praksis dan membawa orientasi perjuangan Islam pada dunia riil.

Marxisme perlu dikawinkan dengan Islam untuk menjadikan Islam lebih realistis dalam pemahaman dan pengamalan ajaran-ajarannya sehingga agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. ini benar-benar menjadi ruh perubahan sosial dan mampu menghadirkan secara konkret tatanan masyarakat yang adil, equal dan bebas dari berbagai eksploitasi dan penindasan. Materialisme Historis dan Dialektis ini dibutuhkan juga sebagai landasan teoritik untuk melakukan kritik imanen atas nalar dan praktek-keagamaan umat Islam yang sekarang ini nampak semakin jauh dari semangat pembebasan sosial (social liberation).

Penutup

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa teologi pembebasan yang diintrodusir oleh Engineer, merupakan upaya intelektual untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan progresif-revolusioner. Dalam paradigma teologi pembebasan Islam yang didukung dan diperkuat oleh Marxisme, praktik-praktik agama (Islam) bisa bermakna dan bernilai jika dan hanya jika dimanifestasikan dalam bentuk gerakan transformasi sosial untuk menuju tata masyarakat yang adil, setara dan tanpa eksploitasi oleh kekuatan apapun.

Keluhuran agama, dalam perspektif teologi pembebasan, diukur dari peran dan fungsinya dalam membebaskan masyarakat dari berbagai dominasi, eksploitasi dan kungkungan struktur dan sistem sosial apapun yang cenderung menindas. Maka, orientasi dari teologi pembebasan adalah perombakan total struktur sosial-masyarakat yang timpang dan tidak adil menuju struktur sosial-masyarakat yang seimbang dan adil. Dalam semangat etis dan politis inilah, Islam dan Marxisme sebenarnya bisa bertemu, bukannya saling menyangkal dan menegasikan, sebab keduanya sama-sama mencita-citakan masyarakat yang setara dan adil; terbebas dari dominasi dan hegemoni dari struktur apapun yang cenderung menindas.

Teologi pembebasan berpandangan, agama adalah kekuatan penting karena di dalamnya mengandung semangat atau ruh perlawanan dan pembebasan terhadap segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Hanya saja memang dalam praktiknya ruh pembebasan dalam agama ini seringkali mengalami reduksi dan distorsi oleh sejumlah pelaku agama. Karena itu, bagi teologi pembebasan, pada level praksis dan interpretasinya agama memiliki wajah ganda: satu sisi ia bisa menjadi kekuatan pembebas yang progresif-revolusioner dan di sisi lain, ia bisa menjadi candu atau malah menjadi kekuatan penindas. Hal ini tergantung pada bagaimana memahami, menginterpretasikan dan menyikapi ajaran agama itu sendiri.

Indonesia belakangan ini seringkali beredar isu penistaan agama. Namun penistaan agama yang sesungguhnya adalah ketika agama seringkali dipolitisir, diselewengkan, ditelikung, diperalat, dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis atau untuk kepentingan ekonomi kelompok-kelompok tertentu, sehingga ruh agama sebagai kekuatan pembebas bagi mereka yang tertindas, penegak keadilan, pembangun persaudaraan dan pembela mereka yang lemah dan tak berdaya justru sekarat bahkan padam.

References

- Arif, S. (2001). *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner, Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, A. A. (2000). *Islam dan Teologi Pembebasan, Cet. 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. (1999). *Asal Usul dan Perkembangan Masyarakat Islam, Terj. Imam Baehaqie, Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. (2001). *Islamic Theology of Liberation*. New Delhi: Gyan Publishing House.
- Engineer, Asghar Ali. (2004). *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers.
- Engineer, I. (2013). *Asghar Ali Engineer: A Crusader for Communal Harmony and Justice*. Mumbai: Centre for Study of Society and Secularism.
- Gutierrez, G. (1974). *Theologie de la liberation-perspectives*. Bruxelles: Lumen Vitae.
- Hanafi, H. (2003). *Dari Akidah Ke Revolusi, Terj. Asep Usman Ismail, Suadi Putro dan Abdul Rouf, Cet. 1*. Depok: Paramadina.
- Hatta, M. (1983). *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Lowy, M. (2003). *Teologi Pembebasan, (Terj.), Roem Topatimasang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Madjid, N. (2005). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Manfred, A. Z. (1974). *A Short History of The World, Jilid I*. Virginia: University of Virginia.
- Marx, K. (1994). Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction. In *Marx: Early Political Writings* (pp. 244-45). Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasution, H. (1986). *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Sikand, Y. (2004). *Muslims in India Since 1947: Islamic Perspectives on Interfaith Relation*. London: Routledge.
- Tuong, V. (2009). Indonesia's agrarian movement: Anti-capitalism at a crossroads. In *Agrarian angst and rural resistance in contemporary Southeast Asia* (pp. 200-225). London: Routledge.
- Utama, A. (2018, Oktober 4). *Mengapa konflik agraria terus terjadi meski pemerintah klaim mereformasi sektor pertanahan?* Retrieved from <https://www.bbc.com/>
- Wahid, A. (2011). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: Democracy Project.